

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Indonesia mengajarkan kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah menjadi acuan masa kini yang menjadi persoalan, berbagai macam persoalan baik itu yang bersumber dari ideologi, pandangan pemikiran yang saling berargumen untuk mengatakan kebenaran. Sejak kemerdekaan hingga sekarang, penyelenggaraan bisa dikatakan gagal dalam menerapkan fungsi utamanya sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa di negeri ini.

Kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mencoba merumuskan masyarakat dan cita-cita politik yang hendak mereka cita-citakan dalam rangka mengisi kemerdekaan yang dibayar dengan harga sangat mahal. Hal ini terlihat ketika perjuangan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam kaitan dengan masyarakat umat Islam di Indonesia, konsep umat selalu dihubungkan dengan pelaksanaan syariat dalam kegiatan individual dan kehidupan kolektif mereka.

Konsep umat menggambarkan suatu masyarakat beriman yang bercorak universal. Setiap muslim yang sadar, merasakan benar bahwa ia adalah anggota umat. Identitasnya sebagai muslim banyak ditentukan dengan keterikatan spiritualnya oleh persaudaraan universal itu. Secara teori, umat percaya bahwa ajaran Islam meliputi seluruh dimensi kemanusiaan. Dengan kata lain, apa yang disebut sekular, dimata seorang muslim, tidak dapat dilepaskan dari persoalan

imannya. Dari sudut pandang ini, cita-cita kekuasaan (politik) menyatu dengan wawasan moral sebagai pancaran iman seseorang muslim. Politik dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari ajaran etika yang bersumber dari wahyu. Bahkan kekuasaan politik merupakan kesadaran untuk merealisasikan pesan-pesan wahyu.¹

Pada abad ke-20 di sebagian kalangan intelektual muslim terpelajar timbul kesadaran untuk membawa umat Islam kepada tingkat kemajuan sebagaimana yang telah dicapainya di abad klasik, dan sekaligus mampu menghadapi tantangan modernisasi. Berbagai penyebab yang membawa kemunduran umat Islam telah dikaji secara seksama dan berbagai solusi untuk mengatasinya juga telah dikemukakan.

Perdebatan yang terus bermunculan hingga bangsa Indonesia ingin mewujudkan negara demokrasi, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bercita-citakan pemerintahan yang bersih dari koruptor. Berbagai organisasi-organisasi yang ikut terlibat dalam agenda politik. Organisasi yang bersifat keagamaan maupun organisasi non keagamaan. Seperti organisasi besar keagamaan Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Organisasi politik yang disebut organisasi partai politik, yang bertujuan untuk menjalankan dan mengontrol pemerintahan dalam merebut kekuasaan dengan mengikuti Pemilu. Begitu juga dengan organisasi Islam yang mencoba membangun partai politik yang berasaskan Islam.

¹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996 Hal.10

Partai politik yang berasaskan Islam ini yang menjadi perdebatan dikalangan para intelektual, yang mengagungkan-agungkan ideologi Islam. Salah satu tokoh fenomenal adalah Nurcholish Madjid yang sangat menentang dengan adanya partai politik Islam.

Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu pertama sejak kemerdekaan Republik Indonesia merdeka, yang sebelumnya direncanakan pada tahun 1946 namun kondisi yang belum nyaman, dan ketika itu masih terjadi perang kemerdekaan akibat agresi Belanda I dan II, dan akhirnya pelaksanaan Pemilu tertunda. Menurut Herbert Feith, ada beberapa hal sebagai penjelas tentang tertundanya pelaksanaan Pemilu.²

Pertama, banyak anggota parlemen yang mendapat kursi karena keadaan dan situasi yang belum normal. Oleh karena itu, kemudian mereka sadar bahwa bila Pemilu dilaksanakan akan mencopot kursinya. *Kedua*, adanya kekhawatiran Pemilu akan menggeser negara ke ideologi Islam. Ketakutan ini, terutama menghinggapi PNI yang khawatir bahwa Pemilu akan mengurangi kekuasaannya. *Ketiga*, pelaksanaan Pemilu akan menghasilkan perwakilan yang lemah bagi daerah-daerah luar Jawa. *Keempat*, ada kekhawatiran bahwa partai-partai politik akan menjadi terlalu besar.

Dalam Pemilu 1955 tidak kurang dari 28 partai politik yang ikut serta sebagai kontesta. Dengan demikian Pemilu 1955 di ikuti oleh banyak partai politik dengan menganut sistem proporsional. Meskipun pesertanya banyak (multi partai), secara garis besar, apabila dilihat dari segi ideologi, dapat digolongkan

² Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978, Hal 274

kedalam tiga aliran ideologi besar, yaitu Islam, Nasionalis, Komunis atau Sosialisme. Tentu saja ketiga aliran ideologi itu, yang berujud dalam kekuatan partai-partai politik, bersaing untuk memperebutkan massa rakyat.³

Salah satu partai politik Islam, yang mengajak hingga mengeluarkan fatwa pada saat menjelang Pemilu 1997. Yang dikatakan Ketua Umum Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ia mengatakan:

“...wajib hukumnya bagi setiap peserta Pemilu 1997 dari kalangan umat Islam pria maupun wanita, terutama warga PPP untuk turut menegakkan hukum dan agama Allah dalam kehidupan bangsa kita, dengan jalan menusuk tanda gambar PPP pada waktunya nanti..... Maka barang siapa diantara umat Islam yang menjadi peserta dalam Pemilu tetapi tidak menusuk tanda gambar PPP, karena takut hilangnya kedudukan atau mata pencaharian maupun karena sebab-sebab lain, adalah termasuk orang yang meninggalkan hukum Allah”.⁴

Dari fatwa tersebut tentulah menjadi beban bagi warga yang beragama Islam sehingga harus mengikuti fatwa dari pimpinan organisasi tersebut. Sehingga dikalangan umat beragama sendiri banyak terjadi kesalahpahaman atas fatwa yang telah dilontarkan. Hal ini tercermin perpolitikan yang dibangun mencoba untuk meyakinkan khalayak dengan menggunakan kata kewajiban. Sehingga itu harus dilakukan tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi kedepannya. Ini menjadi pertentangan ketika dicerna sehingga dapat dinamakan sebagai politisasi agama.

³Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2006 Hal.4

⁴ Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Grasindo, 1991 Hal. 1

Terkadang hal ini membawa pro dan kontra dikalangan masyarakat Islam, terutama dari kalangan Islam tradisional. Nurcholis Madjid adalah salah seorang pembaharu yang banyak ditentang oleh kalangan tradisionalis. Gagasannya tentang sekularisasi dalam Islam, serta pernyataan tentang “Islamyees, partai Islamno” hingga kini banyak diperbincangkan orang.⁵

Nurcholish Madjid hendak membuat pemisahan antara Islam dengan partai Islam. Perjuangan Islam melalui partai hanyalah salah satu usaha dan masih banyak lagi kemungkinan lainnya. Dalam isu yang kedua, ia menganjurkan sekularisasi sebagai salah satu bentuk liberasi atau pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang telah mapan. Maksud dari sekularisasi adalah memisahkan masalah mana yang benar-benar sakral dan mana yang benar-benar *profane*.⁶

Pernyataan Cak Nur yang menjadi populer: Islam yes, partai Islam no, merupakan penegasan ihwal pentingnya esensialitas keberagamaan sebagai sarana menuju transenden, umat harus keluar dari kungkungan simbol-simbol yang tidak membebaskan. Pada tahapan ini Cak Nur mendapatkan penentangan yang cukup besar karena fikirannya dinilai menyimpang dari mainstream yang telah menjadi pegangan kuat oleh umat. Namun demikian, suatu pemikiran yang dianggap menyimpang bukan berarti pertanda runtuhnya peradaban atau masa depan umat. Justru hal itu bisa dikatakan sebagai sinyal menuju masa depan yang mencerahkan. Jika ingin mengantisipasi perkembangan masyarakat masa depan yang mencerahkan. Jika ingin mengantisipasi perkembangan masyarakat masa

⁵Abdullah Sajad, *Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, kabar politik 24 agustus 2012

⁶ Triyoga A.Kuswanto. *Jalan Sufi Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pilar Media.2007 Hal 135

depan, sebaiknya berpaling kepada para intelektual yang menyimpang dari arus utama. Demikianlah menurut Ali Syariati, seorang revolusioner Iran.

Karena itulah Cak Nur sering mempertanyakan idealisme dari parpol-parpol Islam yang dinilainya sudah tidak punya daya tarik lagi sehingga kehilangan dinamika. Jika ini tetap dipertahankan, niscaya umat akan mengalami kemunduran. Hal tersebut karena partai-partai Islam, baik pada tahun 1970-an atau bahkan sampai reformasi tegak, gagal membangun *image* positif dan simpatik. Perpecahan atau *disintegrasi* di kalangan umat Islam itu sendiri, misalnya adalah contoh konkrit dimana partai-partai Islam tidak mampu membangun semangat kesatuan dan persatuan.⁷

Cak Nur kecewa dengan partai-partai Islam yang dianggapnya strukturalis, legalistik dan formalistik. Sehingga Cak Nur mendeklarasikan pada perjuangan dengan mendeklarasikan nilai-nilai keIslaman secara substansial dalam masyarakat sosial kultural, bukan pada wilayah partai Islam. Pada pernyataannya, orang Islam lebih baik tidak memilih partai Islam untuk berkuasa, karena ada yang lebih penting untuk mewujudkan masyarakat untuk mengetahui Islam secara benar bukan tergabung dalam partai politik Islam.

Berkat pembaharuan yang dipelopori Nurcholish Madjid, pandangan mereka bersifat substansialistik, yang diperlukan dalam hubungan agama dan negara. Islam cukup sebagai panduan dalam kehidupan bernegara. Sehubungan dengan itu, maka kaum abangan dan kelompok Islam substansialistik ini tentu akan menolak bentuk-bentuk formalistik agama, termasuk didalamnya partai

⁷ Ibid

politik Islam. Hal ini terbukti dimana tidak semua elit Islam mendirikan partai politik Islam tetapi mereka mendirikan partai-partai yang bersifat pluralis atau bergabung dengan partai-partai nasionalis atau sekuler.⁸

Ketika perjuangan partai-partai Islam dalam piagam Jakarta untuk memasukkan nilai Islam dalam negara, salah satu tokoh Islam yang menentang adalah Nurcholish Madjid penentang terhadap kelompok formalistik dalam memperjuangkan Islam di Indonesia. Karena itu, ketika PPP dan PBB mengusulkan Piagam Jakarta dengan serta merta mereka tidak setuju, karena bagi mereka Islam cukup sebagai sumber etik dan moral dalam kehidupan bernegara, tidak lebih dari itu.⁹

Pembicaraan mengenai pemikiran Nurcholish Madjid menjadi pro kontra tentang pemikiran Islam yang selalu menarik untuk dikaji, hal itu terlihat dalam perkataan tokoh pembaharu Nurcholish Madjid tahun 1970an atau yang disebut masa Orde Baru. Perdebatan yang berkepanjangan membuat umat Islam untuk belajar dan memahami realita antara Islam dan partai politik Islam itu sendiri, yang mana diketahui pada masa sekarang setelah Orde Baru selesai, sehingga perkembangan partai politik Islam terus bertambah dan berkurang. Hal ini tentu menjadi pertanyaan umat Islam itu sendiri.

Waktu itu Nurcholish Madjid sempat dituduh sebagai orang yang salah tuntutan pada masa itu, tuntutan sebagai orang yang paling buruk bukan sebagai orang yang beragama Islam. Ketika ia mengagas konsep pluralisme agama, dan mengungkapkan Islam yes, partai Islam no. Sebagai gerakan pembaharuan yang

⁸ Lili Romli, *op.cit.*, Hal 119

⁹ *Ibid.*

membela modernisasi yang kemudian menjadi akar pemikirannya tentang demokrasi.

Maraknyabermunculan partai-partai Islam yang bertujuan ingin memperjuangkan kemenangan Islam, perjuangan penegakan akidah Islam sebagai dasar kehidupan bernegara, dengan mudah dapat dilihat pada saat setelah terjadinya proses evolusi dari hasil Pemilu 1955 hingga 1999. Partai-partai Islam menunjukkan keunggulan suara yang signifikan. Khususnya untuk Pemilu zaman Orde Baru karena *setting* politiknya yang otoritarian tidak bisa dijadikan sumber analisis politik.¹⁰

Pada Pemilu 1955, sebagaimana diketahui, partai-partai Islam seperti Masyumi, NU (Nahdatul Ulama), PSSI (Partai Sarikat IslamIndonesia) dan Perti, secara kumulatif memperoleh suara sekitar 40-45 persen dari anggota konstuanter. Kedudukan konstuanter sangat strategis yaitu badan yang harus membentuk Undang-Undang Dasar (UUD). Partai-partai non-Islam seperti PNI, PKI, PSI, Parkindo dan Partai Katolik, bila digabung memiliki posisi sedikit melebihi 50 persen dari seluruh anggota konstuanter, akibatnya sidang konstuanter *deadlock*. Partai-partai Islam tidak berhasil menempatkan kewajiban menjalankan syariat agama bagi pemeluknya. Sementara partai-partai lain pun tidak pula berhasil membuat keputusan yang dikehendaki, yang intinya menjadi negara sekuler.¹¹

Hasil Pemilu ternyata tidak memuaskan semua pihak, baik golongan Islam maupun golongan nasionalis tidak ada yang keluar sebagai pemenang dengan suara mayoritas (50%). Masyumi maupun PNI yang tadinya mempunyai harapan

¹⁰S.Kirbiantoro Dody Rudianto, *Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Inti Media Publisher, 2006, Hal 43

¹¹ Ibid

besar akan keluar sebagai pemenang, namun ternyata gagal. Keduanya tidak ada yang keluar sebagai pemenang, bahkan diantara Masyumi dan PNI memperoleh kursi yang sama di DPR, yaitu 57 kursi. Meskipun demikian Pemilu 1955 telah memunculkan empat partai besar, yaitu PNI memperoleh 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI 39 kursi.¹² Partai Islam masyumi mengalami kenaikan dengan 20,9%.

Pada masa Orde Baru, telah terselenggaranya enam kali Pemilihan Umum (Pemilu), yaitu Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997. Dari enam kali Pemilu tersebut tampak Orde Baru berhasil melaksanakan Pemilu secara bersekala setiap lima tahun sekali, kecuali pada Pemilu 1977.¹³ Pada Pemilu 1977, ketika partai partai Islam berfusi dan membentuk wadah baru dengan nama Partai Persatuan Pembangunan, persaingan antara Golkar sebagai partai pemerintah dengan PPP sebagai partai representasi partai Islam berjalan dengan sengit. Little melukiskan suasana Pemilu 1977 sebagai pertarungan yang sengit.¹⁴

Rezim Orde Baru, setelah 32 tahun berkuasa, pada tanggal 28 Mei 1998 berakhir dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari kursi presiden. Kemudian Pemilu dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 1999. Ada 48 partai politik yang lolos ikut Pemilu 1999. Dari jumlah tersebut, 17 di antaranya adalah partai politik Islam itu adalah : PPP, PBB, PK, PP, PUI, PMB, PPIM, PID, PIB, PSII, PSII 1905, PNU, SUNI, KAMI, PAY, da PUMI.¹⁵ Ketika hasil Pemilu 1999 diumumkan, perolehan

¹² Lili Romli, op.cit.,Hal 50

¹³ Ibid

¹⁴ ibid

¹⁵ Ibid

suara partai-partai Islam merosot jauh. Dari 17 partai Islam, hanya satu partai Islam yang masuk lima besar dengan memperoleh suara sebanyak 10,72% (59 kursi). Sedangkan sebagian besar partai Islam lainnya tidak memperoleh suara yang signifikan untuk meraih satu kursi di DPR.¹⁶ Ini bentuk kegagalan partai Islam yang mana mayoritas bergama Islam, belum tentu untuk memilih partai Islam.

Pada Pemilu 2004 jumlah partai politik Islam semakin sedikit hanya lima Parpol Islam. Berdasarkan hasil Pemilu 2004 ternyata betul-betul “ Jauh panggang dari api”, tidak realistis dan *confidence*. Dari lima partai Islam yang ikut Pemilu 2004, PPP memperoleh suara 8,15%, PKS mendapat dukungan suara 7,34%, PBR memperoleh 2,44%, PBB memperoleh 2,62% dan PPNUI mendapat 0,79%.¹⁷ Dari hasil prolehan persentasi Pemilihan Umum 2004 membuat bahwa partai politik Islam kurang laku dimata pemilih Islam, sehingga apa yang diinginkan partai Islam tidak sesuai dengan harapan.

Hingga akhirnya dalam perpolitikan umat Islam sekarang, baik itu partai politik Islam, yang lebih mengedepankan ideologi Islam apakah bisa mewakili umat Islam di parlemen maupun di jajaran pemerintahan. Apakah bisa menjadi contoh tauladan bagi seluruh umat yang akan merepresentasikan nantinya. Ini merupakan pertanyaan besar dalam konteks perpolitikan partai politik Islam di negeri ini.

Maka pemikiran Nurcholish Madjid pada tahun 1970an tentang partai politik Islam, yang mengatakan Islam yes, partai Islam no. Merupakan bentuk

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

kekecewaan terhadap partai politik Islam pada masa itu. Namun, penolakan tersebut haruslah dipahamibukan penolakan terhadap institusi kepartaian politik Islam karena Islamnya. Melainkan institusi partainya yang memanfaatkan atas Islam oleh merekayang terlibat dalam kehidupan partai politik Islam. Tingkah laku politik dan pemanfaatan Islam yang seperti itu pada gilirannya justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya.

Pemilu tahun lalu menunjukkan, pemikiran Cak Nur tahun 1970an masih relevan, bahwa perjuangan Islam tidak bisa dihadapkan dengan agenda pembangunan demokrasi dan bangsa. Sehingga jika parpol Islam dan dakwah Islam ingin maju, harus ditopang kekuatan moral intelektual serta keseriusan dan kesanggupan memecahkan *problem* bangsa serta menciptakan perdamaian.¹⁸ Hal ini yang diharapkan bangsa untuk maju dalam perpolitikan yang tidak sekedar ungkapan tanpa tindakan yang nyata.

Sehingga pemikiran Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam di masa yang akan datang sangat berpengaruh untuk mengembalikan identitas keIslaman. Bagaimana partai politik Islam mampu untuk bersaing dengan partai lainnya yang tidak sekedar ideologi Islam, melainkan untuk mensejahterahkan umat di dalam sebuah negara. Akhirnya kajian ini sangat penting untuk dijadikan rujukan melihat fenomena partai politik Islam yang tidak sesuai dengan ideologinya. Harapan besar untuk mewujudkan demokrasi yang berjalan dengan sebaik-baiknya.

¹⁸ Komaruddin Hidayat, *kompas*, Selasa 30 Agustus 2005

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang penulis deskripsikan yaitu:

1. Bagaimana pandangan politik Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya pandangan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui pandangan politik Nurcholish Madjid.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang melatar belakangi munculnya pandangan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, merupakan langkah awal bagi penulis untuk melakukan penelitian yang dapat menjadi rujukan dan pengetahuan tentang pandangan politik Nurcholish Madjid.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam fikiran (*mind*) manusia karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas : a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain adalah masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik (*political development*), modernisasi dan sebagainya.¹⁹

Menurut Thomas P. Yenkin dalam *The Study of Political Theory* konsep dalam teori politik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu konsep mengenai 3 hal yaitu:²⁰

1. Political Etis yang mewujudkan pelaku-pelaku dalam hubungan politik seperti negara.
2. Konsep tentang hubungan-hubungan diantara pelaku-pelaku seperti wewenang pemerintah.
3. Konsep-konsep mengenai pranata-pranata politik seperti badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.²¹

Menurut Miriam Budiharjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* dijelaskan bahwa pada umumnya dapat dikatakan politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang

¹⁹Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2004 hal 30

²⁰Gani Ismail Selistyati, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984 hal 53

²¹Ibid.

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distributions*) atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi atau jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.²²

2. Pemikiran Politik

Pemikiran politik adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran manusia terbentuk berdasarkan pokok-pokok fikiran dan pandangan-pandangannya. Pokok-pokok fikirannya dan kaidah-kaidah akan bersumber pandangan umum dan sistem kepercayaan. Jadi, pemikiran politik adalah semacam pemikiran yang

²² Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia. 1989 hal 21

bertujuan untuk memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu masyarakat politik.²³

Pemikiran adalah kegiatan dalam fikiran (*mind*) dan dapat dilacak setelah dimanifestasikan. Pemikiran adalah hasil dari proses pemindahan penginderaan fakta kedalam otak melalalui panca indera yang disertai dengan adanya sejumlah pengetahuan terdahulu (*ma'lumat sabiqoh*) yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Pemikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup dan kondisi politiknya.²⁴

Pemikiran politik adalah upaya manusia dengan akal fikirannya untuk mencapai suatu sistem politik ideal, yaitu sistem politik yang konstruktif dengan perkembangan yang solutif dengan problematika masyarakat. Pemikiran politik berkaitan erat dengan sejarah, filsafat politik, etika, moralitas dan idealisme politik. Pemikiran politik seseorang dipengaruhi oleh kondisi internal mencakup nilai-nilai yang diyakini (agama, ideologi, kepribadian). Kondisi eksternal mencakup lingkungan sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, pertahanan-keamanan (baik domestik maupun internasional).²⁵

Pemikiran politik merupakan bagian dari pemikiran Islam yang merupakan hasil ijtihad atau upaya untuk menafsirkan ajaran Islam. Dengan demikian derajat kebenarannya sangat bergantung pada kualitas pemikir dan hasil pemikirannya (argumentasi aqli dan naqli).²⁶

²³ Tijani Abd Qodir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Alqur'an*, Jakarta:Gema Insani Press, Hal Viii

²⁴ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia. 1992 Hal 187

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Dewasa ini pemikiran politik seringkali dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pemikiran²⁷ yakni:

1. Aliran fundamentalis, yakni kelompok dalam Islam yang mencoba berittiba' kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti pemahaman salafush shalih (pendahulu yang shalih dari golongan sahabat, thabi'in dan tabiu't tabi'in) yang dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik. Pemikiran mereka banyak mengikuti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyyim dan sebagainya.
2. Aliran tradisional, yakni kelompok yang mencoba memahami Al-Qur'an dan As Sunnah dengan uraian ulama empat mazhab, walaupun dalam pelaksanaannya banyak yang menyimpang. Mereka biasanya sibuk dalam mengurus kegiatan harian mereka sehingga nampak tidak ada aliran politik yang dominan dikalangan ini. Mereka biasanya tidak mempunyai pemahaman politik yang seragam, kebanyakan dari mereka melibatkan diri didalam arus utama politik kepartaian.
3. Aliran modernis, yaitu mereka yang mengikuti gerakan pembaharuan yang dimulai oleh Syaikh Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani dan Ali Syaria'ati. Mereka memberikan tafsiran kontemporer dan nafas baru kepada pengajaran Al-Qur'an dan As Sunnah. Mereka mengagumi perkembangan dan kemajuan

²⁷ Abdullah Zaidi Hasan, Makalah Pemikiran politik dikalangan aktivis muslim. 14 muharam 1426

yang terjadi di dunia barat, dan menyesuaikan segala sesuatunya itu kepada ruh Islam. Mereka tidak mengutamakan ritual dan bentuk luar, karena mereka lebih mementingkan substansi yang terkandung di dalamnya. Mereka memahami bahwa agama berpangkal pada konteks bukan pada teks. Mereka menekankan perlu adanya ijtihad dan tajdid berdasarkan keadaan masa kini dan berorientasikan kemajuan dan suasana masa kini. Sehingga mereka tidak begitu menyukai golongan ulama sedangkan mereka sendiri menerima demokrasi sebagai praktis politik Islam. Golongan ini hampir terdapat disegenap dunia dan bergerak diberbagai organisasi.²⁸

3. Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikut-sertaannya didalam pemilihan umum.²⁹

Partai politik adalah yang paling banyak mempunyai kesempatan dalam melakukan perubahan. Kekuasaan politik negara secara terorganisasi berada pada partai politik.³⁰

²⁸ Ibid.

²⁹ Sigid Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institut for Democracy and Welfarism. Hal.5

³⁰ S.Kirbiantoro Dody Rudianto, op.cit., Hal.3

Beberapa definisi partai politik yang dikemukakan oleh para tokoh, antara lain:

1. Menurut Carl J.Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya dimanfaatkan yang bersifat adil maupun materiil.³¹

2. Sigmud Neuman,

Dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik sebagai “organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan, dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam hal ini partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan resmi.³²

³¹ Miriam Budiardjo, op, cit., Hal. 404

³² Ibid

3. Mark M.Hagopian

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.³³

4. Raymodn Garfield Gathel atau RH Soitau

Partai politik adalah “sekelompok warga negara yang sedikit terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”.³⁴

b. Fungsi Partai Politik

Dalam sistem negara menganut demokrasi partai politik berfungsi sebagai;

1. Sarana Sosialisasi Politik

Menurut seorang ahli sosiologi politik M.Rush (1992):³⁵

“Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya.

³³ Ramlan Suebakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 166

³⁴ Ulung Pribadi, *Diklat Kuliah Pengantar Ilmu Politik*, (Fisipol UMY, 1996) Hal 43

³⁵ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.* Hal 407

Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam Political Culture menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik kedalam suatu masyarakat”

Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat kita ketahui makna dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam politik, masalah yang ada didalam negara, agar masyarakat dapat memahami apa itu politik dan akhirnya mereka dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Jadi dalam hal ini sosialisasi politik dapat memberikan pendidikan politik yang dilakukan partai politik untuk mentransformasikan nilai-nilai pengetahuan politik kepada masyarakat.

2. Sarana Rekrutmen Politik

“Rekrutmen politik menurut Czudnowskin adalah suatu proses berhubungan dengan individu-individu atau kelompok yang dilatih dalam peran-peran politik aktif”³⁶

Selain itu Czudnowskin juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilihnya atau tidak seseorang dalam lembaga legislatif antara lain yaitu :

³⁶ Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar kinerja partai politik era transisi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004. Hal 101

- a. *Social Background*, artinya faktor ini berhubungan dengan status sosial calon elit dibesarkan.
- b. *Political Socialization*, dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas–tugas ataupun isu–isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- c. *Initial Political Activity*, dimana faktor ini menunjuk pada aktivitas atau pengalaman politik seorang elit selama ini.
- d. *Apprenticeship*, dimana faktor ini menunjukkan langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang sedang menduduki jabatan yang telah diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables*, apabila calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja, namun dinilai faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerjanya, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.
- f. *Motivation*, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.³⁷

³⁷ Ibid

Dari keterangan diatas, rekrutmen politik dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses dimana masyarakat mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Dimana partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik.

3. Sarana Komunikasi Politik

Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang dan tidak akan pernah tersalurkan oleh pemerintah, apabila tidak digabungkan dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada.

Dengan adanya partai politik adalah sebagai wadah penampung aspirasi rakyat, yang menyalurkan pendapat-pendapat rakyat untuk disampaikan ke pemerintah. Baik itu berupa kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Dimana partai politik sebagai penghubung atau jembatan dari rakyat ke pemerintah.

4. Sarana Pengatur Konflik

Dalam sebuah negara tidak bisa dihindari bahwa perbedaan pendapat juga seringkali menimbulkan konflik, oleh karena itu disini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana pengatur konflik harus bisa menjadi mediator atau

penengah dalam hal menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat maupun dilingkungan pemerintah.³⁸

5. Sarana Agregasi dan Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini partai politik disini sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan yang berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di negara yang menganut paham demokrasi.

6. Sarana Partisipasi Partai Politik

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilaksanakan warga negara untuk terlibat

³⁸ Arbi sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, peta, kuasa politik dan pembangunan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hal 8

dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.³⁹

Sedangkan menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah, serta partisipasi ini bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap, atau *sporadic*, serta damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu-individu dalam kegiatan yang terdapat disistem politik. Selain itu partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pimpinan daerah.

Partisipasi politik itu sendiri dibagi menjadi dua jenis antara lain :⁴¹

- a. *Autonomus Partisipation*, adalah partisipasi dari masyarakat yang muncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Pius A partanton, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka 1994. Hal 572

kesadaran individu karena pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan ketergantungan rendah.

- b. *Mobilized Partisipation*, adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya fenomena ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pemerintah yang tinggi, tetapi mendapat tekanan dan pendidikan yang rendah.

Dan Penjelasan singkat dari Maurice Duverger Partai politik berfungsi sebagai:

1. Pendidikan Politik (*Political Education*)
2. Seleksi Politik (*Political Selection*)
3. Penghimpunan/kegiatan politik (*Political Aggregation*)
4. Saluran Pernyataan Kepentingan (*Interest Articulation*)
5. Pengawasan/Pengendalian Politik (*Political Control*)
6. Komunikasi Politik (*Political Communication*)

(Duverger, *Political Parties*, 1967, Methuen, London)⁴²

c. Peran Partai Politik

Peran partai politik adalah memberikan proses pendidikan bangsa khususnya untuk generasi bangsa dan memberikan suatu proses pembangunan politik maupun ekonomi.

⁴² DRS. T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung:Refika Aditama. Hal 92

4. Islam dan Politik Islam

a. Islam

Islam adalah sebuah nama agama, sebuah pengertian yang prevalen digunakan baik dikalangan muslim maupun non muslim. Persepsi tersebut digunakan untuk membedakan antara Mohammedanism sebagai identifikasi, sebagai pengikut Muhammad, bukan dalam pengertian pengikut ajaran atau agama Muhammad. Dalam Islam, Muhammad dianggap sebagai manusia biasa yang terpilih dan diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sedangkan muslim berarti pelaku dalam Islam dalam pengertian lain sebagai orang yang beragama Islam.⁴³

Tentang perkataan Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an, perkataan tersebut disebutkan ada delapan tempat, yaitu :

1. Dalam ayat 19 surat Ali' Imraan, yang bunyinya :
"Sesungguhnya Dien itu pada sisi Allah ialah Al Islam"
2. Dalam ayat 85 surat Ali' Imraan, yang bunyinya :
"Dan barang siapa yang mencari agama yang selain Islam, maka tidaklah diterima daripadanya"
3. Dalam ayat 125 surat Al An'aam, yang bunyinya :
"Maka barang siapa yang hendak ditunjuki oleh Allah, niscaya, dibukakan dadanya kepada Islam"

⁴³ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta:Paramadina. Hal 132-133

4. Dalam ayat 22 surat Az Zumar, yang bunyinya :
“Maka apakah orang yang dibukakan dadanya oleh Allah kepada Islam, maka diatas cahaya dari Tuhannya?”
5. Dalam ayat 7 surat Ash Shaff, yang bunyinya :
“Dan siapakah yang lebih menganiaya diri dari pada orang yang berbuat dusta atas nama Allah, padahal ia diseru kepada Islam?”
6. Dalam ayat 74 surat At Taubah, yang bunyinya :
“Mereka (kaum munafik) bersumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak berkata, pada hal sesungguhnya mereka telah mengatakan kalimat kufur, dan mereka telah berkufur sesudah mereka Islam”
7. Dalam ayat 17 surat Al Hudjuraat, yang bunyinya :
“Mereka menghitung-hitung anugerah kepadamu (Muhammad), lantaran mereka telah mengikuti Islam. Katakanlah olehmu : Janganlah engkau menghitung-hitung anugerahmu kepadaku, lantaran keIslaman kamu”
8. Dalam ayat 3 surat Al-Maa-idah, yang bunyinya :
“Pada hari ini Aku (Allah) telah menyempurnakan kepada kamu agama kamu, dan Aku telah mencukupkan atas kamu ni'matKu, dan Aku telah meridhai Islam itu sebagai agama untuk kamu”⁴⁴

⁴⁴ K.H Munawar Chalil, *Defenisi dan Sendi Agama*, Djakarta: Bulan Bintang, 1970. Hal 37

Islam merupakan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertauhid, ketundukan mutlak kepadanya dengan mentaatinya dan pembebasan diri dari orang-orang musyrik⁴⁵

Sikap pasrah kepada tuhan sebagai unsur kemanusiaan yang alami dan sejati, kesatuan kenabian dan ajaran para nabi untuk semua umat dan bangsa, semuanya itu menjadi dasar universalisme ajaran yang benar dan tulus, yaitu Al-Islam.⁴⁶

Adapun rukun Islam sendiri ada 5, sehingga orang Islam harus memenuhi rukun Islam tersebut;

1. Mengucapkan Dua kalimat Syahadat
2. Mendirikan Shalat
3. Membayar Zakat
4. Berpuasa
5. Melaksanakan Ibadah Haji “bila mampu”

Sebagaimana telah dijelaskan tentu umat Islam harus mengetahui dan melaksanakan sehingga amal dan perbuatan menjadi jalan menuju rahmatnya.

Kuntowijoyo membagi tiga sub gerakan yang dapat dirumuskan sehubungan dengan Islam sebagai gerakan kultural. *Pertama*, Islam sebagai gerakan intelektual, yaitu gerakan yang mengangkat nilai-nilai

⁴⁵Abibuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta :Raja Grafindo Persada. Hal 64

⁴⁶Nurcholish Madjid, *Islam dan Doktrin Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemordenan*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992, Hal 438

Islam sebagai konsep ilmu di bidang sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. *Kedua*, Islam sebagai gerakan etik, yaitu gerakan yang menumbuhkan serangkaian sikap atau etos tentang sesuatu. Misalnya, dalam bidang ekonomi di samping di perlukan pertumbuhan juga perlu ditambahkan dengan pemerataan, keadilan, kebersamaan dan lain sebagainya. *Ketiga*, Islam sebagai gerakan estetis, yaitu gerakan yang mengupayakan terciptanya lingkungan simbolik yang lebih bermakna keIslaman.⁴⁷

b. Politik Islam

Sistem yang dibangun Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern, tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellence*. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya dan fundamental memaknawi tempat sistem itu berpijak.⁴⁸

Pemikiran politik Islam secara historis terpetakan dalam tiga priode dari awal terbentuknya pemikiran itu sampai sekarang yaitu priode klasik, pertengahan dan kontemporer. Pemikiran politik Islam

⁴⁷Sudirman Tebba, *Islam di Indonesia: Dari Minoritas Politik Menuju Mayoritas Budaya*, Jurnal Politik, No.4 tahun 1989, Hal. 63

⁴⁸M.Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani 2001, Hal 4

periode klasik dan pertengahan, melahirkan tokoh-tokoh intelektual semacam Ibn Arabi, Al-Farabi, Al-Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibn Khaldun. Secara garis besar kesimpulan para tokoh itu adalah : *pertama*, dari enam tokoh hanya Farabi yang mengadakan idealisasi tentang segi-segi dan prangkat kehidupan bernegara, sedangkan para pemikir yang lain berusaha memberikan sumbangan pemikiran dengan bertitik tolak pada realitas sistem monarki yang ada, yang mereka terima masing-masing sebagai sistem yang tidak perlu lagi dipertanyakan keabsahannya. Bahkan diantara mereka ada yang memulai tulisannya dengan terlebih dahulu memberikan legitimasi kepada sistem monarki tempat mereka hidup.⁴⁹

Kedua, teori tentang asal mula timbulnya negara dari enam pemikir Islam itu hampir sama, yaitu tampak sekali pengaruh alam pikir Yunani yang mencoba dikawinkan dengan alam pikiran Islam. Yang berbeda dengan pemikiran Yunani, para tokoh Islam baik secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia saja, tetapi juga kebutuhan rohani dan ukhrawi. Ibn'Arabi (1970), Ghazali (1975) dan Ibnu Taimiyah (1980) dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja, merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Ketiga tokoh ini berpendapat, bahwa khilafah itu adalah khalifah Allah atau bayangan Allah di

⁴⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press 1993, Hal 108

bumi. Bahkan kekuasaan khalifah, menurut Ghazali, adalah suci (muqaddas), dengan pengertian tidak dapat diganggu gugat (Ghazali,1975). Hal ini berbeda dengan Mawardi, yang menyatakan bahwa seorang kepala negara dapat diturunkan dari tahta, jika tidak mampu lagi memerintah baik disebabkan oleh alasan jasmani, mental dan akhlak, meskipun dia tidak menunjukkan bagaimana penurunan itu dilaksanakan (Al-Mawardi, 1973).

Ketiga, Ibnu Khaldun berpikiran, bahwa lebih baik menggunakan ajaran dan hukum agama (baca: Islam) sebagai dasar kebijakan dan peraturan negara dari pada hasil ijtihad (rekayasa pemikiran) manusia.⁵⁰Sementara pemikiran politik Islam kontemporer Indonesia yang diwakili antara lain oleh Nurcholish Madjid, Amien Rais dan Abdurrahman Wahid, secara umum mereka berpendapat bahwa tidak ada konsep tentang negara Islam. Dan mereka juga sepakat untuk menerapkan secara maksimal nilai moral-etis Al-Qur'an dalam mengembangkan sistem sosial dan politik yang lebih egaliter, demokratis, adil dan manusiawi.⁵¹

Melalui ideologi Islam dapat dilakukan pencerahan dan perombakan aspek-aspek kehidupan diseluruh sektor kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islami yang menjadi titik tolak dan arah bagi pembangunan bangsa. Dalam konteks politik, Maududi bahkan

⁵⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Jakarta : Pustaka Firdaus 1986, Hal 189

⁵¹ Anjar Nugroho, *Pemikiran Politik Amien Rais dan Abdurrahman Wahid*, Laporan Penelitian, 2002

mensintesisakan teosentrisme Islam dengan demokrasi dengan demokrasi dalam konsep “*Theo Demokrasi*”. Ideologi sebagai agama menurut Syariati (192:148), memang memiliki pemihakan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan dan filsafat.⁵²

Beberapa pendapat para orientalis antara lain :

1. Dr. V. Fitzgerad berkata, “Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun diatas kedua fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”
2. Prof. C. A. Nallino berkata, “Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama (*a religion*) dan negara (*a state*). Dan batas-batas teritorial negara dan dia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya.”
3. Prof. R.Schacht berkata, “Islam lebih dari sekedar agama: ia juga mencerminkan teori-teori, perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.”

⁵²S.Kirbiantoro Dody Rudianto, op.cit., Hal.45

4. Prof. R. Strothmann berkata, “Islam adalah suatu fenomena agama dan politik karena pembangunannya adalah seorang nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, atau seorang negarawan.”
5. Prof. D.B. Macdonald berkata, “Disini (di Madina) di bangun negara Islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam.
6. Prof. Gibb berkata, “Dengan demikian, Jelaslah bahwa Islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan, dan institusi.”⁵³

Jadi jelaslah bahwa politik Islam yang merupakan keterkaitan antara Islam dan politik yang ingin mewujudkan baik dari segi peraturan perundang-undangan, institusi atau sistem pemerintahan sehingga berjalan dengan semestinya negara Islam.

F. Definisi Konsepsional

Seperti yang dijelaskan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang dimaksud dengan konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang

⁵³ Dr. M. Dhiauddin Rais, op.cit., Hal 6

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁵⁴

- Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama dengan menggapai kehidupan yang lebih baik.
- Pemikiran politik adalah jenis pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat politik.
- Partai politik Islam adalah organisasi sosial politik yang berideologi Islam untuk mencapai kekuasaan dalam sistem pemerintahan di suatu negara dengan menerapkan nilai-nilai Islami.

G. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, perlu dilakukan pembatasan pembahasan guna memfokuskan pada permasalahan tertentu saja agar tidak terjadi perluasan atau semakin melebarnya pembahasan. Selain itu, batasan masalah dalam sebuah penelitian digunakan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik.

Dalam penulisan ini, peneliti akan membatasi kajian penelitian pada pandangan politik Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam. Untuk mendapatkan penelitian yang objektif maka penulis juga tidak melupakan peristiwa sebelumnya yang melatarbelakangi lahirnya pandangan politik tentang partai politik Islam.

⁵⁴Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta.LP3ES 1989, hal.34

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bogman dan Taylor menjelaskan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, yakni mempelajari masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena dalam masyarakat.⁵⁵

2. Unit Analisis

Unit analisa data adalah suatu data terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok permasalahan dalam penelitian. Unit analisa data berisikan penegasan tentang kesatuan yang menjadi obyek dan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisa adalah pandangan politik Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam.

3. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen

⁵⁵Bisri Mustofa, *Pedoman Menuliskan Proposal Penelitian Dan Tesis*, Yogyakarta:Panji Pustaka, 2009. Hal.6

melalui buku-buku, literatur atau dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yakni proses pengumpulan data melalui membaca buku-buku, artikel, arsip, website dan catatan-catatan lainnya. Yang dapat mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Data kualitatif dipergunakan sebagai landasan untuk menganalisis secara deskriptif yaitu sebuah analisis yang hanya mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan membandingkan data penelitian dengan teori yang ada. Sehingga hasil akhir dari analisa ini merupakan kemampuan penulis dalam mendeskripsikan suatu permasalahan dalam menggunakan informasi dan fakta yang ada.